

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Organisasi adalah sebuah tempat atau wadah bagi sekumpulan orang atau lebih yang melakukan kerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Organisasi publik memiliki peran penting yang mana organisasi ini memiliki orientasi kepada pelayanan publik. Menurut Irianto (2012:5) sektor publik memiliki karakteristik tertentu yang tidak melekat dalam sektor privat yaitu tidak berorientasi pada perolehan keuntungan (*profit*) namun pada kepentingan masyarakat serta dimiliki oleh pemerintah dan bukan merupakan kepemilikan pribadi.

Salah satu organisasi publik atau instansi pemerintah yang ada adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK, adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi yang dimaksud terdapat pada

berbagai bidang. Misalnya kompetensi atau keahlian di bidang teknik manufaktur, teknik las, teknik otomotif, teknik listrik, teknik elektronika, *refrigeration*, bangunan, bisnis dan manajemen, teknologi informasi dan komunikasi, *garment apparel* (menjahit, teknik bordir), tata kecantikan, tata busana, processing, desain batik, pengolahan kulit, dan lain sebagainya.

Memasuki era pasar kerja yang sangat beragam, tenaga kerja dituntut untuk memiliki *skill* yang memadai dalam suatu bidang tertentu agar dapat diaplikasikan dalam pekerjaannya. Sehingga banyak para calon tenaga kerja mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh UPT Balai Latihan Kerja guna meningkatkan keterampilan atau keahliannya.

Menurut Muhtarom (2015) kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan secara umum masih ditandai relatif rendahnya kualitas tenaga kerja, baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilannya. Akibatnya, tingkat produktivitas tenaga kerja menjadi rendah, sehingga posisi tawar (*bargaining position*) menjadi rendah; tingkat upah yang rendah; sering terjadinya perselisihan hubungan industrial, dan pemutusan hubungan kerja (PHK), serta rendahnya jaminan kesejahteraan purna-kerja.

Dengan demikian salah satu permasalahan pada ketenagakerjaan adalah kualitas tenaga kerja yang kurang memadai sehingga belum bisa memenuhi kriteria atau persyaratan perusahaan ataupun dunia kerja yang begitu banyak dan spesifik.

Permasalahan tenaga kerja yang berpangkal dari rendahnya kualitas tenaga kerja dapat diatasi dengan diselenggarakannya program pelatihan kerja guna memberikan keterampilan dan kompetensi bagi calon tenaga kerja. Selain itu juga

dapat ditanamkan sisi kewirausahaan agar tenaga kerja dapat membaca dan memasuki potensi wilayahnya dengan berwirausaha. Untuk merespon hal tersebut maka pemerintah menyediakan salah satu lembaga pelatihan kerja yang mengarahkan peserta menuju dunia kerja melalui Balai Latihan Kerja.

UPT Balai Latihan Kerja adalah lembaga yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya pemerintah dalam hal pembangunan ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Bab 2 Pasal 4 yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan merupakan salah satu organisasi publik atau instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Dengan misinya yaitu meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan menjalin kemitraan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar kerja serta sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Tercapainya peningkatan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan yang akan datang,

2. Lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi yang ditempatkan dan
3. Terbentuknya pelatihan swadana UPT Balai Latihan Kerja yang diharapkan.

UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan menjalankan program pelatihan berbasis kompetensi. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi perlu diukur tingkat efektivitas implementasi dari program tersebut. Sehingga dalam implementasi program pelatihan berbasis kompetensi di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan nantinya dapat diketahui apakah program tersebut sudah efektif atau belum dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten.

Menurut Bernard (1982:117) dalam Yamtini efektivitas adalah suatu tindakan dimana tindakan itu akan efektif apabila telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Sondang P. Siagian (2001:24) dalam Yamtini efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Menurut Sandfort dan Moulton pengukuran efektivitas implementasi dapat diukur menggunakan beberapa prinsip. Prinsip ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam melihat ukuran atau tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan. Adapun prinsip-prinsip untuk meningkatkan efektivitas implementasi menurut Sandfort dan Moulton (2015) yaitu:

1. Konteks yang dapat mempengaruhi perubahan

Konteks yang dapat mempengaruhi perubahan berkaitan dengan partisipan, sumber daya, sumber kekuasaan atau yang memiliki kewenangan dalam

program pelatihan berbasis kompetensi, dan juga nilai-nilai budaya apa yang tercipta dalam suatu organisasi.

## 2. Membuka program prioritas

Dalam menjalankan suatu program dapat dilihat mengenai pilihan yang layak, logika perubahan yang terjadi dengan adanya program pelatihan berbasis kompetensi tersebut, koordinasi yang dilakukan organisasi dengan para *stakeholder*, dan mengidentifikasi perubahan untuk mencapai hasil nilai publik.

## 3. Menghadapi tantangan teknis dan adaptif untuk menciptakan perubahan serta menerapkan penyelidikan analitis dan keterampilan sosial

Dalam melaksanakan suatu program pasti terdapat tantangan-tantangan teknis yang dihadapi. Sehingga dari adanya tantangan-tantangan tersebut bagaimana penyesuaiannya di lapangan agar dapat menciptakan perubahan. Kemudian aktor kebijakan menerapkan penyelidikan analitis dan keterampilan sosial yang dimiliki untuk dapat mempengaruhi perubahan.

Adapun dalam pelaksanaan program pelatihan berbasis kompetensi tersebut penulis menemukan beberapa kendala yang dialami pada saat sebelum dan pada saat pelaksanaan pelatihan sehingga berjalan kurang maksimal pada saat proses implementasinya. Kendala yang muncul yaitu:

1. Perbedaan tipe peserta dalam proses pembelajaran yang terkadang menjadi hambatan tersendiri saat proses pelaksanaan pelatihan,
2. Background pendidikan peserta pelatihan,

3. Hambatan dalam proses pembelajaran siswa disabilitas atau siswa berkebutuhan khusus,
4. Anggaran dana yang bisa berubah sewaktu-waktu.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas maka perlu diukur seberapa jauh efektivitas implementasi program pelatihan berbasis kompetensi tersebut dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Efektivitas Implementasi Program Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan”.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Adapun dari rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas implementasi program pelatihan berbasis kompetensi di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi program pelatihan berbasis kompetensi di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas implementasi program pelatihan berbasis kompetensi di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan.
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi program pelatihan berbasis kompetensi di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka diharapkan dalam penelitian ini akan bermanfaat bagi berbagai kalangan baik bagi Civitas Akademi UYP, masyarakat, maupun pemerintah baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

**1.4.1.1** Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan yang sudah ada khususnya yang berkaitan dengan bidang studi Ilmu Administrasi Publik.

**1.4.1.2** Diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas berkaitan dengan efektivitas implementasi kebijakan publik pada organisasi publik khususnya UPT Balai Latihan Kerja.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1.4.2.1** Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan khususnya kepada peneliti, mengenai efektivitas implementasi serta melihat praktik secara langsung di lapangan berkaitan dengan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya sehingga dapat menambah pengetahuan peneliti berkaitan dengan program studi Ilmu Administrasi Publik.

##### **1.4.2.2** Bagi Instansi Terkait

Diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan kontribusi yang positif khususnya bagi instansi terkait yaitu UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan.

##### **1.4.2.3** Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta dapat menarik minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan yang tersedia di UPT Balai Latihan Kerja Pasuruan serta partisipasinya dalam memberikan penilaian terhadap organisasi sektor publik ini sehingga tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dan juga lembaga pemerintah dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.

#### **1.4.2.4 Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya mengenai efektivitas implementasi kebijakan pada organisasi sektor publik.